



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai landasan utama dalam penelitian ini, tinjauan pustaka memegang peranan penting untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai teori dan hasil studi terdahulu yang relevan dengan topik yang diangkat. Melalui kajian literatur yang telah penulis lakukan, penulis mengidentifikasi berbagai konsep, kerangka teori, serta penelitian sebelumnya yang menjadi pijakan dalam merumuskan kerangka berpikir dalam penelitian ini.

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Risk Aversion Theory

Risk Aversion Theory adalah teori yang diperkenalkan oleh Allingham dan Sandmo (1972). Menurut mereka hanya sedikit bahkan sampai tidak ada individu yang rela melakukan kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Individu (masyarakat) akan selalu menentang untuk melakukan wajib pajak, peristiwa tersebut biasa dikenal dengan Risk Aversion Menurut Hamongan dan Mukhlis pada tahun 2012 mereka mengatakan bahwa Risk Aversion Theory mengeluarkan sebuah asumsi dimana semakin tinggi tingkat pajak individu maka semakin tinggi tingkat ketidakpatuhan individu tersebut dalam melakukan wajib pajak. Analisa yang digunakan adalah seperti individu yang memiliki jumlah penghasilan yang jumlahnya tetap atau tidak berubah dan penghasilan yang akan dilaporkan kepada pemerintah juga harus ditentukan sendiri oleh individu tersebut. Kepatuhan terhadap perpajakan telah di atur dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 bertujuan untuk meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan kepatuhan sukarela wajib pajak. Kepatuhan didefinisikan sebagai sifat patuh atau ketaatan, yang mencerminkan perilaku seseorang dalam memenuhi anjuran, perintah, atau aturan yang telah ditetapkan tanpa adanya paksaan. Dengan demikian, kepatuhan menunjukkan sikap positif individu dalam menjalankan norma atau peraturan yang berlaku.

2.1.2. Theory Of Planned Behavior

Teori perilaku berencana atau *Theory Of Planned Behavior* (TPB) merupakan teori yang menjelaskan permasalahan apa yang membuat seseorang melakukan tindakan tertentu (Hadianto, Hidayat, & Ningrum, 2024). *Theory of Planned Behavior* digunakan untuk menggambarkan bagaimana perilaku wajib pajak terkait

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Menurut Ajzen pada tahun 1991 faktor sentral atau faktor tengah dari perilaku individu perilaku itu dipengaruhi oleh niat dari perilaku itu sendiri. Lalu Niat untuk melakukan sesuatu dipengaruhi oleh 3 hal yaitu sikap, norma subjektif, dan yang terakhir adalah persepsi kontrol kepemilikan. Menurut Achmat pada tahun 2010 Teori Perilaku Terencana atau TPB (*Theory Of Planned Behavior*) didasari oleh asumsi bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai pemikiran yang rasional dan menggunakan serta menyerap informasi-informasi yang menurutnya sistematis. Individu tersebut memikirkan cara mengimplikasi dari tindakan mereka sebelum mereka memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku-perilaku tertentu. Implikasi itu sendiri adalah suatu akibat yang terjadi karena suatu hal, yang disebabkan oleh perkataan maupun kejadian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implikasi diartikan sebagai keterlibatan atau keadaan terlibat, yang termasuk atau tersimpul, atau yang disugestikan tetapi tidak dinyatakan

2.1.3. Kepatuhan Pajak

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Kepatuhan berasal dari kata dasar patuh yang berarti sifat patuh atau ketaatan, yaitu sikap suka menurut atau taat terhadap perintah, aturan, atau ajaran tertentu. Kepatuhan wajib pajak adalah dimana wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakan mereka sekaligus menggunakan hak-hak yang dimilikinya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Wardan & Rumiya, 2017). Kepatuhan itu sendiri merupakan suatu keadaan atau kondisi dimana Ketika saat Wajib Pajak paham atau mempunyai usaha yang dimaksudkan untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan seperti mengisi formulir pajak dengan benar, menghitung jumlah pajak dengan benar, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Pajak masuk dalam teori *Risk Aversion*.

Untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran perpajakan kendaraan bermotor, pemberian sanksi atas pajak kendaraan bermotor diperlukan sebagai upaya penegakan hukum untuk menciptakan ketertiban terhadap wajib pajak. Secara tidak langsung hal ini membuat para wajib pajak diharapkan bisa meningkatkan kesadaran terhadap kepatuhan pajak kendaraan mereka. Kesadaran Pajak merupakan Suatu keadaan di



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

mana wajib pajak sadar dan memahami makna, peran, serta tujuan dari pembayaran pajak kepada negara. Apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi, hal ini akan memengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak yang lebih baik lagi (Octaviani, Irawati, & Sofyan, 2024).

Kesadaran wajib pajak mencerminkan rasa tanggung jawab individu atau badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan menyadari tujuan pembayaran pajak. (Marta, Prama Yoga, & Jayanti, 2024). Teori ini masuk kedalam *Theory Of Planned Behavior*. Sesuai Namanya kesadaran merupakan perilaku individu yang dilakukan oleh masyarakat wajib pajak, dalam kesadaran itu sendiri berarti sikap yang muncul dalam individu yang menyebabkan individu tersebut melakukan tindakan yang di inginkan. Maka dari itu *Theory Of Planned Behavior* merupakan teori yang sangat cocok dengan Kesadaran Pajak karena arti dari *Theory Of Planned Behavior* itu sendiri adalah kerangka berfikir konseptual yang menjelaskan dan menerangkan hal terkait dengan perilaku itu sendiri.

Dimensi atau indikator kepatuhan wajib pajak mencakup beberapa aspek, yaitu kepatuhan dalam proses pendaftaran wajib pajak, kepatuhan dalam penyetoran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak yang terutang, serta kepatuhan dalam melunasi pembayaran dan tunggakan pajak yang ada (Risa & Puspita Sari, 2021). Berdasarkan (Ristanti, Khasanah, & Kuntadi, 2022) kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, terbagi menjadi 4 dimensi yaitu kepatuhan dalam mendaftarkan diri, kepatuhan menyetorkan/melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan. Dari dimensi tersebut masing-masing memiliki indikator yaitu wajib pajak, membayar pajak tepat waktu, menyampaikan SPT tepat waktu, melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu dan benar.

2.1.4. Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang memiliki kewajiban sebagai upaya melunasi pajak, melaporkan, dan melaksanakan pajak lainnya. Wajib pajak kendaraan bermotor telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Undang-undang ini bertujuan untuk



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, dengan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pajak juga merupakan sumber utama bagi penerimaan negara khususnya ada pada anggaran pendapatan dan belanja atau yang biasa dikenal dengan APBN. APBN digunakan untuk membiayai keperluan-keperluan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, fasilitas tersebut salah satunya berbentuk suatu objek yang dapat digunakan dan di nikmati oleh para kalangan masyarakat secara sadar dan tidak sadar. Contoh fasilitas tersebut bisa berupa jalan raya yang bagus, Jalan raya yang bagus menunjukkan dan membuktikan bahwa kewajiban pajak yang dilakukan oleh masyarakat membuahkan dan menghasilkan fasilitas infrastruktur yang dapat dinikmati. Selain itu Pendidikan dan kesehatan juga merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat akan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan pembayaran pajak kendaraan juga berperan sebagai faktor pendukung kemakmuran kehidupan masyarakat. Berdasarkan penjelasan sebelumnya Wajib Pajak dapat dikategorikan sebagai *Risk Aversion Theory*.

2.1.5. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan khususnya kendaraan roda 2 memiliki peran yang sangat vital. Dalam pembangunan infrastruktur, sekolah dan lain-lain merupakan hasil dari pembayaran pajak kendaraan, kita tidak hanya memenuhi kewajiban, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Undang-Undang mengenai perpajakan daerah berisi untuk mendukung kemudahan berusaha serta layanan daerah yang bertujuan untuk Memperkuat peran pemerintah daerah dalam kebijakan fiskal nasional dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan ini berisi bagian dari upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mempermudah proses perpajakan di tingkat daerah, serta sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pajak kendaraan bermotor adalah jenis pajak yang dikenakan kepada kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pajak ini termasuk dalam kategori pajak daerah. Pajak kendaraan roda 2 juga memiliki



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

perhitungan tersendiri. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 7 ayat 1 mengemukakan bahwa pajak kendaraan bermotor dihitung dengan mengalikan besaran tarif dengan besaran dari dasar pengenaan pajak. Berdasarkan dari sumber yang penulis temukan terdapat 1 Rumus yang digunakan untuk perhitungan pajak kendaraan bermotor, Perhitungan tersebut sebagai berikut :

$$\text{PKB Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak Atau bisa juga seperti}$$

$$\text{PKB Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$$

Berdasarkan rumus tersebut PKB yang menjadi kewajiban dipungut dari wilayah domisili kendaraan motor tersebut terdaftar. Kemudian Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dilakukan sekaligus pada saat penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sementara pemungutan PKB tahun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan Pajak Kendaraan Bermotor dapat dikategorikan sebagai *Theory Of Planned Behavior* Penulis dapat mengkategorikan teori tersebut pada Pajak Kendaraan Bermotor ini disebabkan oleh perilaku masyarakat terhadap kesadaran mereka akan subjek pajak kendaraan bermotor. *Theory Of Planned Behavior* itu sendiri mengandung cara mengimplikasi dari Tindakan yang akan dilakukan. Pajak Kendaraan Bermotor Merupakan Tindakan yang harus dilakukan dan di ingat oleh masyarakat yang merupakan kewajiban dari masyarakat itu sendiri.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dari sumber yang saya dapatkan terkait dengan penlitian saya yang berjudul “Analisis Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Atas Pajak Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kota Bekasi” Penulis menemukan :

Table 3. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Nama Peneliti & sumber	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan
1.	PENGARUH KESADARAN WAJIB	Handini Pratami Hadiano,	Untuk mengetahui analisis	Metode penelitian kuantitatif	1. Kesadaran wajib pajak tidak memberikan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	<p>PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, DAN PENERAPAN SISTEM E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BEKASI PADA KANTOR SAMSAT KOTA BEKASI</p>	<p>Wastam Wahyu Hidayat, Endah Prawesti Ningrum, ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri</p>	<p>pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas layanan fiskus, dan penggunaan sistem E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Bekasi</p>	<p>dengan menggunakan data primer yaitu berupa kuesioner. Untuk mendapatkan beberapa sampel</p>	<p>pengaruh yang berarti terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Bekasi.</p> <p>2. Mutu pelayanan fiskus memberikan dampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Bekasi. Implementasi sistem e-Samsat memberikan dampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Bekasi</p>
<p>2.</p>	<p>PERAN KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BEKASI</p>	<p>Monika br Nainggolan, Abdilah, Rudi Rahwana, http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrp</p>	<p>Mengetahui dan menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor memberikan pengaruh terhadap kepatuhan</p>	<p>Menggunakan penelitian kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka. Bertujuan untuk menganalisis data</p>	<p>1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p> <p>2. Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

			wajib pajak di Kota Bekasi dan Untuk mengetahui dan menganalisis Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Bekasi.	yang didapat sebelumnya menggunakan metode statistic.	
3.	PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK BADAN PADA UKM KOTA BEKASI	Yusril, Aep Syaepudin, Ekonomid anBisnis Volume I- No.1 Januari 2021 Copyright@2021, Oleh STIEBisnis Internasional Indonesia	Mengetahui seberapa besar pengaruh sosialisasi perpajakan Tingkat pendidikan, dan pemahaman Hubungan antara wajib pajak dan kepatuhan pajak pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di wilayah Kota Bekasi.	Jenis penelitian ini adalah kuantitatif survey, Teknik pengambilan sampel Dalam penelitian ini, purposive sampling diterapkan dengan mengambil semua Usaha Kecil	1. Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak badan pada UKM di kota Bekasi dengan nilai tertentu 2. Tingkat Pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak badan pada UKM di kota Bekasi. Memiliki tingkat signifikansi (P-value) yaitu



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

				dan Menengah yang tercatat di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi, yaitu sebanyak 86 UKM, sebagai sampel.	3. Tingkat pemahaman wajib pajak tidak memberikan dampak yang berarti terhadap kepatuhan wajib pajak. badan pada UKM di kota Bekasi. Memiliki tingkat signifikansi (P-value) yaitu sebesar 0.367
4.	PENGARUH KEBIJAKAN PERPAJAKAN, ADMINISTRASI PERPAJAKAN, DAN TARIF PAJAK, TERHADAP PERENCANAAN PAJAK PADA WAJIB PAJAK BADAN DI KOTA BEKASI SELATAN	LAYI NA AZIZ AH RAH MA H, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2017	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan tarif pajak, perencanaan pajak dan menguji pengaruh kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan tarif pajak terhadap	Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif menggunakan program SPSS 22.	1. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap perencanaan pajak. Pada hasil regresi tersebut, kebijakan perpajakan memiliki arah yang positif terhadap perencanaan pajak. 2. perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap perencanaan pajak. Semakin tinggi berkas kelengkapan administrasi pajak, maka kegiatan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

			perencanaan pajak (tax planning)		<p>perencanaan pajak dengan baik dan benar akan semakin tinggi pula. Pengetahuan wajib pajak badan mengenai adminitrasi yang muncul apabila melakukan kecurangan dalam pajak sudah cukup baik</p> <p>3. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh signifikan ke arah positif terhadap perencanaan pajak. Hal ini dikarenakan, semakin tinggi pengetahuan tentang tarif pajak maka akan semakin tinggi Keinginan untuk melakukan perencanaan pajak</p>
5.	PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK	ANIS SYAMSU RIZAL, Jurnal Ilmiah Akuntans Universitas Pamulan	Penelitian ini bertujuan untuk menggambarakan konsumen membuat keputusan jika terdapat	Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif. Dengan cara	1. Terdapat “pengaruh positif dan signifikan” antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KENDARAAN BERMOTO DAN SISTEM SAMSAT DRIVE THRU TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Vol. 7, No. 1, Januari 2019	kondisi ketidakpatuhan pada konsekuensi pilihannya	menyebabkan kuesioner yang disebarakan sebanyak 125 responden.	ini menunjukkan bahwa wajib pajak mempunyai pengetahuan tentang pajak yang tinggi dan cenderung taat akan kewajibannya 2. Terdapat “pengaruh yang negatif dan tidak signifikan” Pada variabel sanksi pajak kendaraan bermotor, diketahui bahwa meskipun seorang wajib pajak menyadari sanksi yang akan diterima, mereka tetap mengabaikan kewajibannya sebagai wajib pajak. Terdapat “pengaruh positif dan signifikan” terdapat keterkaitan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini mengindikasikan bahwa para wajib pajak di Samsat Polda Metro Jaya
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

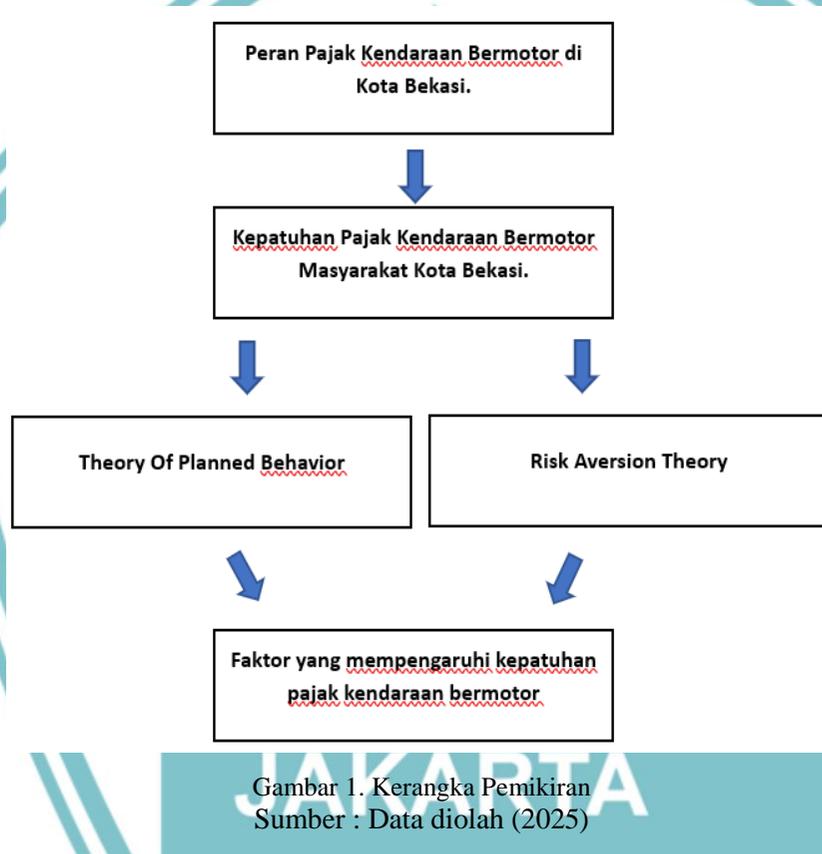
					Jakarta Selatan memiliki tingkat kesadaran yang sangat tinggi terhadap tanggung jawab mereka sebagai wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban tersebut.
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Data diolah

Berdasarkan pada 5 jurnal penelitian terdahulu yang penulis temukan sebagai penelitian tersebut bagi penulis. kemudian Penulis menemukan perbedaan yang sedang penulis lakukan saat ini. dari kelima jurnal penelitian yang penulis temukan bahwa 5 penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif, metode kuantitatif ini bertujuan salah satunya untuk memahami fenomena secara detail dan menggunakan pengolahan data menggunakan angka yang dibuat. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum menggali secara mendalam mengenai alasan, proses, dan makna di balik fenomena yang diteliti. Lalu pada penelitian terbaru ini penulis menggunakan metode kualitatif, Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan pendekatan kuantitatif, karena bertujuan mendapatkan makna dan pengalaman subjek secara mendalam melalui metode kualitatif. hal tersebut berbeda dari 5 jurnal yang penulis temukan sebelumnya. Metode kualitatif bertujuan untuk memperoleh dan mengklasifikasikan pemahaman secara mendalam, makna dan proses dalam penelitian. Sedangkan kuantitatif lebih mengarah pada pengukuran, pengujian dan hipotesis, generalisasi dan lain sebagainya. Selain itu metode kualitatif juga bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat diukur secara objektif, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Selain itu penulis menemukan bahwa metode kuantitatif memiliki kelemahan dalam memperoleh pengalaman maupun persepsi dari narasumber atau narasumber, Penulis menggunakan metode kualitatif dikarenakan dengan metode kualitatif penulis dapat menutup celah yang ada dalam kuantitatif yaitu memperoleh pengalaman secara langsung dan mendapatkan validasi secara langsung mengenai data yang penulis dapatkan.

2.3. Kerangka Pemikiran

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kepatuhan pajak pada kendaraan bermotor di Kota Bekasi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dengan target umur dari 18 – 50 tahun sebagai pengguna kendaraan bermotor, serta bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat maupun mempengaruhi masyarakat Ketika masyarakat tersebut tidak melakukan wajib pajak kendaraan mereka. Kerangka tersebut dapat di jabarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Sumber : Data diolah (2025)

Peran pajak kendaraan merupakan hal penting bagi negara oleh karenanya masyarakat dapat menikmati dan menggunakan berbagai macam fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Salah satu contoh infrastruktur yang dapat dilihat adalah “Jalan Trotoar” fasilitas tersebut merupakan hasil dari pengumpulan dana pembayaran wajib pajak yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Secara umum kesadaran merupakan pemahaman tentang pikiran, perasaan, dan persepsi terhadap dunia luar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesadaran diartikan sebagai keinsafan atau keadaan mengerti. Peneliti bertujuan untuk mencari tahu tingkat kesadaran wajib pajak yang dilakukan oleh masyarakat di Kota

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Bekasi, Apakah masyarakat mempunyai tingkat kesadaran yang cukup tinggi atau belum cukup untuk memenuhi kriteria “Sadar” dalam kewajiban pajak kendaraan mereka.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Kepatuhan pajak merupakan hal yang harus dilakukan oleh masyarakat tiap tahunnya terutama pada pajak kendaraan mereka. Setiap tahun masyarakat melakukan wajib pajak dengan berbagai cara. Ada yang menggunakan system Online dan ada juga yang datang ke samsat itu sendiri. Tetapi sering juga ditemukan oknum yang tidak patuh akan kewajiban pajak kendaraan mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya faktor yang menghambat mereka dalam pembayaran kewajiban pajak tersebut. Peneliti berniat untuk mengetahui faktor serta hambatan apa saja yang dialami oleh masyarakat Kota Bekasi terhadap kewajiban pajak kendaraan mereka.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif Menurut Rukajat (2018) penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian dengan tujuan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena suatu kegiatan, aktivitas, dan pemikiran individu atau kelompok dengan cara membuat tulisan ataupun secara lisan serta perilaku individu yang sedang diamati.

Pada penelitian yang penulis lakukan, penulis berfokus pada masyarakat yang mempunyai usia 18-50 tahun. Karena pada usia tersebut biasanya masyarakat sudah memiliki kendaraan bermotor pribadi. Adapun maksud dari penelitian ini untuk memperoleh informasi mengenai kepatuhan masyarakat akan kewajiban pajak kendaraan bermotor mereka di Kota Bekasi. Dalam penelitian ini nantinya penulis akan memperoleh informasi secara langsung dengan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara dengan narasumber.

3.2. Objek Penelitian

Subjek dan objek penelitian merupakan unsur penting dalam sebuah penelitian ilmiah karena menjadi pusat dari proses pengumpulan dan analisis data. Objek penelitian diartikan sebagai variabel yang diteliti oleh peneliti di lokasi penelitian, yang menjadi pokok permasalahan yang hendak dicari solusinya melalui pendekatan ilmiah (Hamidah & Hakim, 2023). Dengan demikian, objek penelitian bertujuan menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masyarakat Kota Bekasi. Objek ini dipilih karena kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), memiliki peran strategis dalam meningkatkan penerimaan daerah dan mendukung pembangunan infrastruktur serta penyediaan layanan publik. Tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti risk aversion, pemahaman perpajakan, serta norma subjektif yang berkembang dalam masyarakat. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang berdomisili di Kota Bekasi dan memiliki kendaraan yang terdaftar atas nama pribadi. Para wajib pajak tersebut dijadikan responden dalam pengumpulan data

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

melalui penyebaran kuesioner dan pelaksanaan wawancara. Mereka dipilih karena dianggap dapat memberikan informasi yang relevan terhadap variabel-variabel yang diteliti, yakni risk aversion, theory of planned behavior, dan kepatuhan wajib pajak.

3.3 Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti terhadap karakteristik wajib pajak yang dianggap relevan dan representatif untuk memberikan informasi mendalam terkait dengan kepatuhan terhadap pajak kendaraan bermotor pada masyarakat di Kota Bekasi. Dalam hal ini Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian, karena data dimaksudkan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik, Maka dari itu sangat penting untuk memilih cara memperoleh data dan dari siapa data akan diperoleh, Teknik pengambilan sampel secara sengaja, yang juga disebut pengambilan sampel berdasarkan penilaian, adalah pilihan yang disengaja oleh seorang partisipan.

Berikut kriteria yang penulis terapkan Ketika melakukan pengambilan sampel:

- 1) Narasumber harus berusia 18-50 tahun dan memiliki kendaraan pribadi dengan kepemilikan yang jelas.
- 2) Kendaraan tersebut diharuskan memiliki status kepemilikan yang jelas atas nama narasumber itu sendiri di STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).
- 3) Menyadari pentingnya pajak sebagai kontribusi kepada negara.
- 4) Kendaraan yang dimiliki oleh narasumber harus memiliki usia kepemilikan minimal 1 tahun.
- 5) Merupakan masyarakat Kota Bekasi.

3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam Penelitian ini jenis penelitian data yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode kualitatif. Penulis menggunakan data primer serta data sekunder dimana data primer diperoleh dengan langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan narasumber, yaitu masyarakat pemilik kendaraan bermotor di Kota Bekasi. Data Sekunder yang penulis dapatkan dari dokumen pendukung yang relevan, seperti data administrasi perpajakan kendaraan bermotor, literatur, dan dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Penulis juga menggunakan indikator sebagai salah satu tolak ukur agar dapat mengklasifikasikan dengan mudah serta dapat



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

mempersempit penelitian. Penelitian tersebut menggunakan kendaraan sebagai objek penelitian itu sendiri, serta masyarakat sebagai subjek yang memiliki kendaraan bermotor. Penelitian ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan terkait dengan kepatuhan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor masyarakat yang mereka harus lakukan setiap tahun. Dengan demikian, fokus utama pengumpulan data adalah pada data primer yang diperoleh langsung dari penyebaran kuesioner dan wawancara dengan masyarakat pemilik kendaraan bermotor di Kota Bekasi.

3.5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik utama dalam pengumpulan data, yaitu kuesioner (angket) dan wawancara. Kedua teknik ini dipilih untuk memperoleh data yang lebih komprehensif dan mendalam sebagai berikut ini :

3.5.1. Kuesioner

Kuesioner disusun dalam bentuk pertanyaan tertutup menggunakan skala Likert lima poin, dari "Sangat Tidak Setuju" hingga "Sangat Setuju". Kuesioner ini disebarkan kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi, melalui media online seperti *Google Form*. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian agar data yang dikumpulkan relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian.

3.5.2. Wawancara

Selain kuesioner, peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa responden terpilih untuk menggali informasi lebih dalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan mereka dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur. Peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan panduan tetapi tetap memberi ruang bagi responden untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara bebas. Teknik ini membantu peneliti memahami konteks dan alasan di balik jawaban responden dalam kuesioner, serta memberikan data kualitatif sebagai pelengkap.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dari responden. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan



adalah kuesioner dan pedoman wawancara, yang disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel penelitian, yaitu *Risk Aversion* dan *Theory Of Planned behavior* (TPB).

Kuesioner disusun menggunakan skala Likert empat poin, mulai dari “Sangat Tidak Setuju” hingga “Sangat Setuju”, dengan tujuan untuk mengukur sikap, persepsi, serta kecenderungan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terhadap kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Selain kuesioner, pedoman wawancara digunakan sebagai instrumen tambahan untuk menggali informasi yang lebih mendalam, terutama terkait alasan di balik perilaku wajib pajak yang mungkin tidak tergambarkan secara lengkap melalui kuesioner tertutup.

Berikut adalah daftar pernyataan dalam kuesioner yang telah disusun berdasarkan teori yang digunakan, dimensi teori, serta indikator yang diukur :

Table 4. Pertanyaan Penelitian

No	Pertanyaan	Teori Terkait	Dimensi Teori	Indikator
1	Saya sudah mendaftarkan kendaraan saya secara resmi.	TPB	Perceived Behavioral Control	Kepatuhan terhadap proses 37ublic37trative (pendaftaran kendaraan).
2	Saya selalu membayar pajak kendaraan tepat waktu.	TPB	Perceived Behavioral Control	Disiplin dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan sesuai jadwal.
3	Saya tahu cara menghitung jumlah pajak	TPB	Perceived Behavioral Control	Pemahaman individu mengenai

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	kendaraan yang harus dibayar.			perhitungan kewajiban pajak kendaraan bermotor.
4	Saya takut mendapat sanksi jika tidak membayar pajak kendaraan.	Risk Aversion	Persepsi Risiko	Kekhawatiran individu terhadap sanksi hukum atau denda jika tidak taat membayar pajak.
5	Saya merasa pajak kendaraan yang saya bayar terlalu tinggi.	Risk Aversion	Persepsi Tarif & Risiko	Persepsi subjektif mengenai besaran tarif pajak kendaraan yang dianggap memberatkan.
6	Saya akan membayar pajak walaupun tidak ada subli kendaraan.	TPB	Subjective Norm	Norma internal yang mendorong individu untuk tetap patuh walaupun tidak ada pengawasan.
7	Saya percaya bahwa uang pajak	TPB	Attitude Toward the Behavior	Sikap positif terhadap manfaat



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	kendaraan digunakan untuk fasilitas umum.			pembayaran pajak bagi kepentingan public.
8	Saya pernah menunggak pajak kendaraan lebih dari 1 tahun.	Risk Aversion	Persepsi Risiko	Riwayat keterlambatan membayar pajak yang mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
9	Saya merasa tidak ada kendala untuk membayar pajak kendaraan saya.	TPB	Perceived Behavioral Control	Keyakinan bahwa tidak ada hambatan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
10	Saya selalu membawa STNK saat berkendara.	TPB	Attitude Toward the Behavior	Sikap kepatuhan terhadap aturan lalu lintas terkait dokumen kendaraan.
11	Saya membayar pajak kendaraan karena memang itu	TPB	Subjective Norm / Attitude	Kesadaran moral atau norma pribadi bahwa membayar pajak adalah



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	kewajiban saya.			bentuk tanggung jawab warga.
12	Saya memahami akibat hukum jika tidak membayar pajak kendaraan.	Risk Aversion	Pengetahuan Risiko dan Sanksi Hukum	Pemahaman terhadap konsekuensi hukum jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

Sumber : (Ristanti, Khasanah, & Kuntadi, 2022) dan (Risa & Puspita Sari, 2021)

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada kepatuhan masyarakat pemilik kendaraan bermotor di Kota Bekasi terhadap kewajiban perpajakan kendaraan tiap tahunnya. Untuk itu, penulis menyusun serangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman dan sikap mereka mulai dari proses pendaftaran kendaraan, ketepatan waktu pembayaran pajak, sampai pada pemahaman dan persepsi mereka terhadap perhitungan tarif pajak serta manfaat dari pembayaran pajak tersebut. Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang agar dapat menggali berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, termasuk aspek pengetahuan, sikap, dan persepsi risiko yang berlandaskan pada teori perilaku terencana dan teori penghindaran risiko. Dengan metode ini, kami berharap memperoleh data primer yang komprehensif langsung dari responden untuk memberi gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor yang mendorong ataupun menghambat kepatuhan pajak kendaraan bermotor di masyarakat.

3.6. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian kualitatif umumnya dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Gunawan, 2013). Penulis menggunakan ketiga tahapan tersebut untuk menganalisis data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan kuesioner sebagai berikut:

1. Reduksi Data



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Reduksi data merupakan tahap awal dalam proses analisis data kualitatif yang penting. Pada tahap ini, penulis melakukan proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang dikumpulkan dari hasil wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Tujuannya adalah untuk mengklasifikasikan serta menyusun data agar diperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Melalui reduksi data, penulis dapat menyaring berbagai informasi, seperti alasan, faktor, dan temuan penting lainnya yang muncul dari interaksi dengan narasumber.

2. Penyajian Data

Tahap berikutnya adalah penyajian data. Penulis menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk narasi atau tabel agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Data yang diperoleh dari wawancara dan kuesioner akan disusun secara sistematis untuk menggambarkan kondisi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi. Penyajian ini bertujuan untuk melihat pola, kecenderungan, atau hubungan antara variabel yang diteliti.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, data yang telah direduksi dan disajikan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penulis menarik kesimpulan berdasarkan temuan lapangan mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, serta mengklasifikasikan kelompok responden yang termasuk ke dalam kategori patuh atau tidak patuh. Kesimpulan ini dirumuskan sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian.

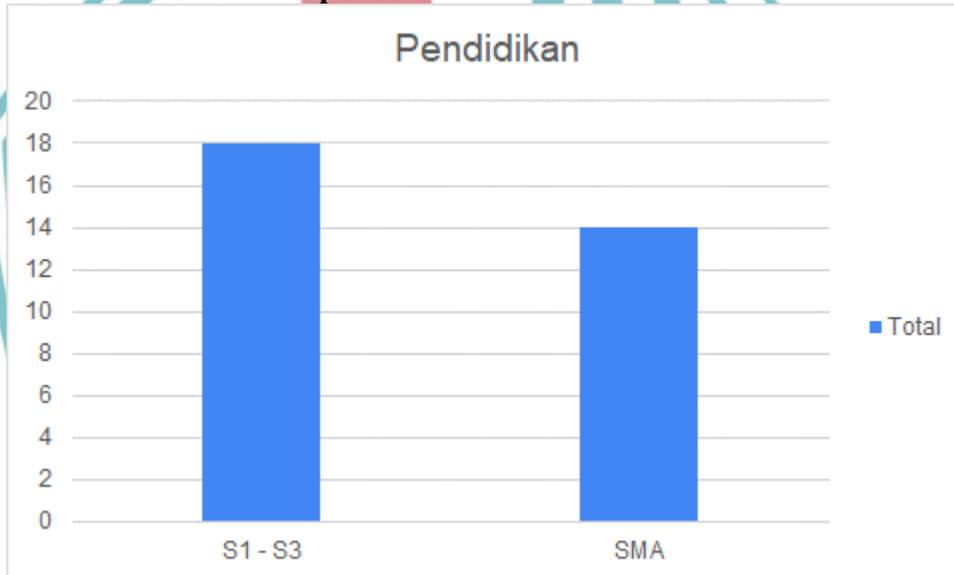


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis melibatkan 32 responden yang merupakan masyarakat Kota Bekasi pemilik kendaraan bermotor yang memenuhi kriteria purposive sampling, yakni berusia antara 18–50 tahun dan memiliki kendaraan atas nama pribadi. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara untuk menggali informasi mengenai kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

4.1.1 Gambaran Umum Responden



Gambar 2. Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan
Sumber: Data Diolah, (2025)

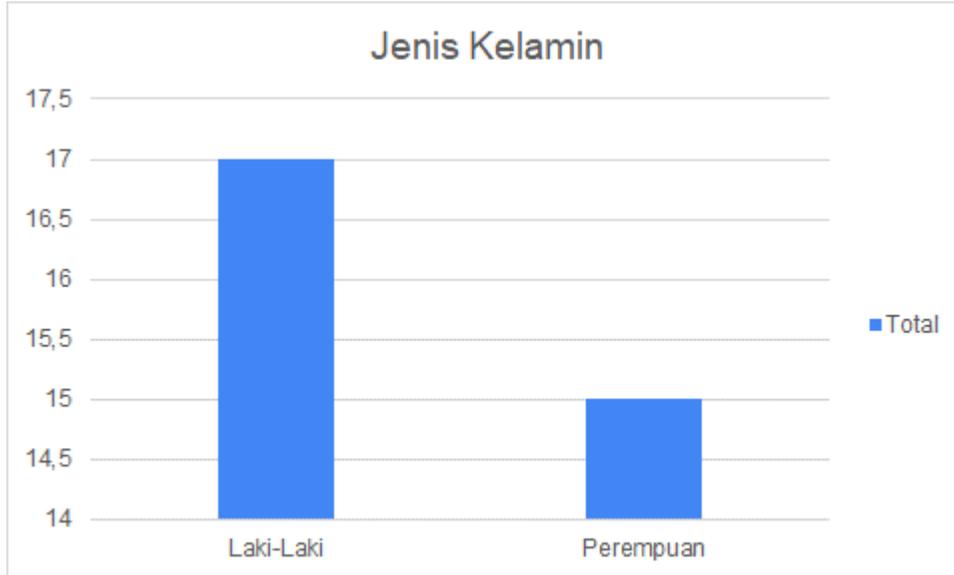
Grafik diatas merupakan hasil dari penjumlahan pada kriteria pendidikan, berdasarkan data grafik diatas, penulis mendapatk 18 responden dengan pendidikan S1-S3 dan 14 responden dengan pendidikan SMA.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

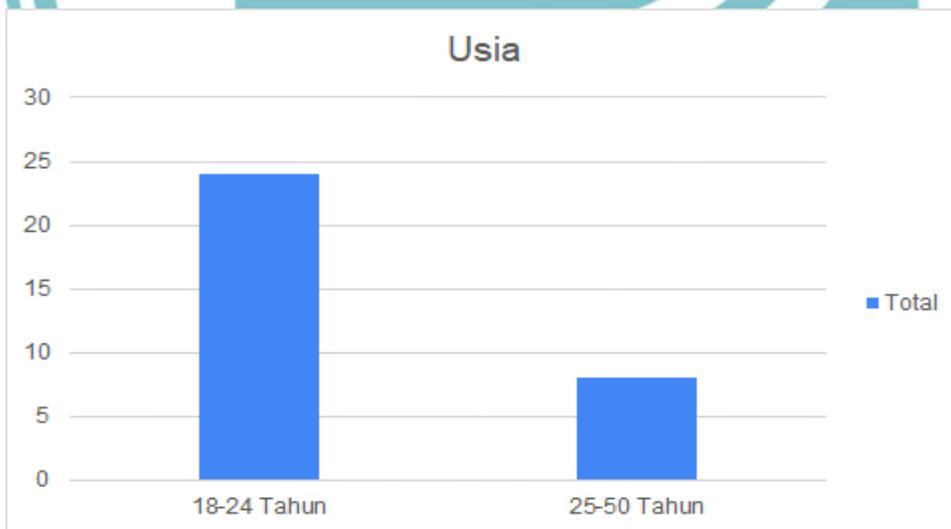
Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Gambar 3. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber: Data Diolah, (2025)

Grafik diatas merupakan hasil dari penjumlahan pada kriteria jenis kelamin, berdasarkan data grafik diatas, penulis mendapatkkan 17 responden berjenis kelamin laki-laki dan 15 responden berjenis kelamin perempuan.



Gambar 4. Karakteristik Responden berdasarkan Usia
Sumber: Data Diolah, (2025)

Grafik diatas merupakan hasil dari penjumlahan pada kriteria usia responden, berdasarkan data grafik diatas, penulis mendapatkkan 24 responden berusia 18-24 tahun dan 8 responden berusia 25-50 tahun.

4.1.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Bekasi sebagai lokasi pengumpulan

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

data utama. Kota Bekasi dipilih karena Kota Bekasi merupakan urutan ketiga Kota dengan pemilik kendaraan bermotor terbanyak di Jawa Barat (BPS, 2024). Kegiatan pengumpulan data dilakukan pada hari Kamis dan Jumat dengan mempertimbangkan ketersediaan responden dan efektivitas pelaksanaan metode penelitian di lapangan.

Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi penyebaran kuesioner, wawancara secara langsung, serta wawancara daring melalui platform *Google Meet*. Kombinasi metode ini memungkinkan pengumpulan data yang komprehensif dan fleksibel, baik dari peserta yang hadir secara fisik maupun yang hanya bisa dihubungi secara *online*, sehingga mendukung validitas dan keakuratan hasil penelitian. Dengan jadwal dan metode ini, penelitian diharapkan dapat berjalan efektif selama periode yang telah ditentukan.

4.1.3 Hasil Olah Data



Gambar 5. Pertanyaan 1
Sumber: Data Diolah, (2025)

Berdasarkan data grafik, penulis mendapatkan 19 responden untuk opsi "sangat setuju", 11 responden untuk opsi "setuju", dan 2 responden untuk opsi "tidak setuju". Hasil ini diperkuat oleh wawancara yang penulis lakukan, di mana mayoritas jawaban menyebut faktor ekonomi sebagai alasan utama pembelian motor "bodong" karena harganya yang lebih murah dan penggunaannya terbatas pada lingkungan tertentu. Selain itu, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa persaingan antar dealer dapat menyebabkan distribusi kendaraan tidak sesuai prosedur.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Gambar 6. Pertanyaan 2
Sumber: Data Diolah, (2025)

Berdasarkan data grafik, sebanyak 16 responden sangat setuju, 15 responden setuju, dan 1 responden tidak setuju. Hasil ini diperkuat oleh wawancara yang penulis lakukan, yang mengidentifikasi beberapa faktor utama penyebab keterlambatan pembayaran pajak. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi ekonomi seperti penghasilan pas-pasan atau prioritas uang untuk kebutuhan lain, ketidaktahuan atau kelupaan jadwal pembayaran, rasa malas dan menganggap remeh pentingnya membayar pajak tepat waktu, serta beberapa kasus di mana surat kendaraan (STNK/BPKB) sedang dijaminkan.



Gambar 7. Pertanyaan 3
Sumber: Data Diolah, (2025)



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Berdasarkan data grafik, 13 responden sangat setuju, 16 responden setuju, dan 3 responden tidak setuju. Hasil ini diperkuat oleh wawancara penulis, yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak mengetahui secara detail rincian pajak kendaraan. Mayoritas hanya mengetahui total pembayaran dari informasi yang tertera di STNK. Hanya sedikit yang menyadari bahwa pajak tergantung pada jenis kendaraan dan kapasitas mesin (CC).



Gambar 8. Pertanyaan 4
Sumber: Data Diolah, (2025)

Berdasarkan data grafik, 18 responden sangat setuju dan 14 responden setuju. Hasil ini diperkuat oleh wawancara penulis, di mana hampir semua narasumber menyatakan rasa takut, terutama jika terjadi razia atau audit dari pihak kepolisian/perusahaan. Namun, beberapa di antaranya merasa aman selama kendaraan tidak digunakan di jalan raya atau hanya digunakan di lingkungan sekitar.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Gambar 9. Pertanyaan 5
Sumber: Data Diolah, (2025)

Berdasarkan data grafik, 10 responden sangat setuju, 17 responden setuju, dan 5 responden tidak setuju. Hasil ini diperkuat oleh wawancara yang penulis lakukan. Terkait dengan persepsi terhadap besaran pajak, sebagian narasumber menganggap pajak terlalu tinggi karena penghasilan mereka yang pas-pasan. Namun, beberapa responden lain menyatakan pajak tersebut sesuai dan relatif, tergantung pada jenis kendaraannya. Ada pula yang berpendapat bahwa pajak tersebut wajar selama kendaraan digunakan dan memiliki manfaat.

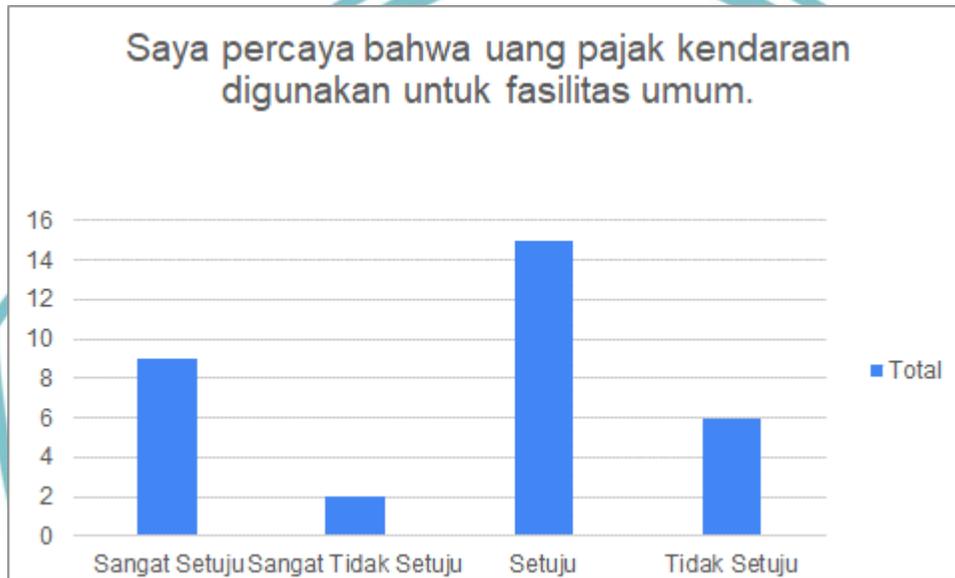


Gambar 10. Pertanyaan 6
Sumber: Data Diolah, (2025)

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Berdasarkan data grafik, 15 responden sangat setuju, 16 responden setuju, dan 1 responden tidak setuju. Hasil ini diperkuat oleh wawancara yang penulis lakukan. Mayoritas responden menyatakan akan tetap membayar pajak, terutama mereka yang memiliki kesadaran akan kewajiban atau karena tuntutan dari perusahaan. Namun, beberapa narasumber yang hanya menggunakan kendaraan di lingkungan lokal mengaku tidak selalu membayar tepat waktu jika tidak ada razia.



Gambar 11. Pertanyaan 7
Sumber: Data Diolah, (2025)

Berdasarkan data grafik, 9 responden sangat setuju, 2 responden sangat tidak setuju, 15 responden setuju, dan 6 responden tidak setuju. Hasil ini diperkuat oleh wawancara yang penulis lakukan. Terkait kepercayaan terhadap penggunaan pajak, beberapa narasumber percaya dan menyebutkan bahwa pajak digunakan untuk pembangunan jalan dan fasilitas publik. Namun, beberapa lainnya ragu atau tidak tahu pasti, bahkan ada yang menyatakan kurang percaya karena sering muncul kasus penyalahgunaan pajak di media.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Gambar 12. Pertanyaan 8
Sumber: Data Diolah, (2025)

Berdasarkan data grafik, 3 responden sangat setuju, 10 responden sangat tidak setuju, 9 responden setuju, dan 10 responden tidak setuju. Hasil ini diperkuat oleh wawancara yang penulis lakukan dengan mengumpulkan hasil penelitian yang dilakukan secara langsung kepada narasumber.



Gambar 13. Pertanyaan 9
Sumber: Data Diolah, (2025)

Berdasarkan data grafik, 11 responden sangat setuju, 16 responden setuju, dan 4 responden tidak setuju, Hasil ini diperkuat oleh wawancara yang penulis lakukan. Kendala yang sering dihadapi saat membayar pajak kendaraan meliputi faktor



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ekonomi dan antrean panjang di tempat pembayaran, serta pelayanan yang lambat dan kurang efisien. Namun, beberapa responden menyatakan tidak mengalami kendala karena sudah rutin dan terbiasa membayar pajak.



Gambar 14. Pertanyaan 10
Sumber: Data Diolah, (2025)

Berdasarkan data grafik, 20 responden sangat setuju, 11 responden setuju, dan 1 responden tidak setuju. Hasil ini diperkuat oleh wawancara yang penulis lakukan. Sebagian besar narasumber menyatakan ya, mereka membawa surat-surat kendaraan, terutama saat bepergian jauh atau ke jalan raya. Namun, beberapa narasumber tidak membawa surat-surat kendaraan jika hanya berkendara di sekitar lingkungan rumah.



Gambar 15. Pertanyaan 11
Sumber: Data Diolah, (2025)

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Berdasarkan data grafik, 15 responden sangat setuju, 1 responden sangat tidak setuju, 14 responden setuju, dan 1 responden tidak setuju. Hasil ini diperkuat oleh wawancara penulis, di mana mayoritas responden menyatakan membayar pajak karena kesadaran akan kewajiban sebagai warga negara. Selain itu, beberapa narasumber juga menyebutkan membayar pajak karena aturan perusahaan atau untuk menghindari masalah.



Gambar 16. Pertanyaan 12
Sumber: Data Diolah, (2025)

Berdasarkan data grafik, 16 responden sangat setuju, 1 responden sangat tidak setuju, 13 responden setuju, dan 2 responden tidak setuju. Hasil ini diperkuat oleh wawancara yang penulis lakukan. Mayoritas responden memahami risiko dan sanksi hukum terkait pelanggaran pajak kendaraan, seperti tilang, denda, dan pemeriksaan saat razia. Namun, ada satu narasumber yang tidak tahu jelas tentang sanksi hukum dan belum pernah mendapat penyuluhan.

Selain penyebaran kuesioner, penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara kepada responden. Berdasarkan hasil dari wawancara yang penulis lakukan terhadap narasumber, secara garis besar menggambarkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dari aspek administratif, pemahaman, motivasi, dan persepsi. Pertanyaan mencakup kebiasaan membayar pajak tepat waktu, pemahaman terhadap perhitungan dan sanksi, serta alasan membayar pajak baik karena kesadaran hukum maupun tekanan eksternal. Selain itu, juga dilihat bagaimana persepsi wajib pajak terhadap besaran pajak dan kepercayaan pada penggunaan dana pajak. Dengan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

demikian, pertanyaan-pertanyaan ini menilai kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh dan mendalam.

4.2 Pembahasan

4.2.1. Tingkat Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Bekasi

Berdasarkan hasil olah data dari 12 pertanyaan kuesioner yang diberikan kepada 32 responden, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi termasuk dalam kategori cukup tinggi. Rata-rata sekitar 79% responden menunjukkan sikap dan perilaku yang mendukung terhadap kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hasil ini memperkuat kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB), di mana kepatuhan dipengaruhi oleh sikap individu terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kendali perilaku. Sebagian besar responden menunjukkan sikap positif terhadap pentingnya membayar pajak tepat waktu, serta memiliki persepsi bahwa pembayaran pajak adalah tanggung jawab sebagai warga negara. Ini terlihat dari 75% hingga 87,5% responden yang menyatakan memahami dan menyetujui kewajiban pajak. Selain itu, motivasi untuk membayar PKB lebih banyak didorong oleh kesadaran pribadi, bukan semata karena rasa takut terhadap sanksi, yang sesuai dengan konsep norma subjektif dalam TPB.

Namun demikian, *Risk Aversion Theory* juga terlihat dalam perilaku sebagian kecil responden yang pernah menunggak pajak karena alasan ekonomi, ketidaktahuan, atau anggapan bahwa risiko tidak membayar pajak masih bisa dihindari. Sebanyak 28,1% responden pernah mengalami keterlambatan membayar pajak, mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan masih bisa dipengaruhi oleh persepsi terhadap risiko sanksi dan beban ekonomi yang dirasakan. Selain itu, 71,9% responden menganggap bahwa sosialisasi pemerintah masih belum maksimal, menunjukkan bahwa persepsi kontrol dan informasi publik yang terbatas dapat memengaruhi keputusan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, perlu adanya pendekatan yang tidak hanya menekankan pada penegakan hukum (risk) tetapi juga memperkuat pemahaman, norma sosial, dan sikap positif melalui edukasi dan pelayanan yang lebih baik.



4.2.2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ini menjadi penyebab dominan masyarakat menunda atau tidak membayar pajak. Mas Andi menyatakan:

“Yaa kalau untuk orang kayak kita ya terlalu tinggi, karena kita penghasilan juga pas-pasan jadi agak beban untuk bayar gitu”.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterbatasan finansial membuat pembayaran pajak bukan menjadi prioritas. Hal serupa juga diungkapkan oleh Bu Evi dan Mas Bim yang menekankan bahwa pembelian motor bodong terjadi karena harga yang lebih murah dan kebutuhan ekonomi yang mendesak.

b. Kurangnya Pengetahuan dan Sosialisasi

Sebagian besar narasumber mengetahui bagaimana cara menghitung pajak kendaraan dan mereka memiliki pengetahuan akan sanksi yang mereka dapat ketika mereka tidak patuh akan kewajiban pajak kendaraan mereka. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik sebelumnya yang menyatakan bahwa Sebagian besar responden takut terkena sanksi jika tidak membayar pajak kendaraan mereka. Namun di sisi lain penulis menemukan minimnya pengetahuan edukasi dari pihak pemerintah. Hal tersebut didukung oleh narasumber yang penulis dapat ketika melakukan wawancara oleh narasumber yang Bernama Andi:

“Kalau untuk hitung begitu kurang tau sih mas saya”

Bahkan, hanya Mas Fauzi yang menjelaskan bahwa ia mengetahui nominal pajak dari STNK, meski tidak menyebutkan cara perhitungannya secara pasti. Ini mendukung teori Theory of Planned Behavior di mana perilaku individu sangat dipengaruhi oleh persepsi dan pemahaman mereka terhadap suatu tindakan.

c. Rendahnya Kepercayaan terhadap Pemerintah

Banyak narasumber menunjukkan keraguan terhadap pemanfaatan pajak yang dibayarkan. Seperti yang diutarakan Mas Fauzi:

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

“Soalnya Indonesia ini kan kurang percaya ya, mayoritas 70% lari kemana, soalnya banyak kan kejadian pajak tuh di berita”

Sikap skeptis ini berpotensi melemahkan motivasi masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Ketika masyarakat merasa kontribusinya tidak memberikan dampak langsung atau nyata, maka perilaku patuh menjadi melemah.

d. Lingkungan Sosial dan Pengaruh Institusi

Lingkungan sosial, seperti perusahaan atau komunitas, juga memiliki dampak signifikan. Mas Fauzi menekankan bahwa perusahaannya (Coca-Cola) melakukan pengecekan berkala terhadap STNK dan SOP perusahaan mengharuskan pegawainya taat pajak. Faktor eksternal seperti ini menjadi dorongan kuat terhadap kepatuhan meski tidak sepenuhnya berasal dari kesadaran individu.

e. Kualitas Pelayanan Samsat

Keluhan terhadap pelayanan juga ditemukan dalam hasil wawancara yang penulis lakukan. Andi menyebutkan:

“Pelayanan lama sih mas, itu juga menghambat masyarakat buat bayar pajak”.

Padahal salah satu upaya pemerintah seperti penerapan E-Samsat diharapkan menjadi solusi untuk mengurangi hambatan administratif ini. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat memahami atau mampu mengakses sistem ini dengan baik, sehingga pelayanan masih dianggap lambat dan menyulitkan. Meskipun begitu mayoritas responden menyatakan tidak mengalami kendala ketika melakukan pembayaran pajak kendaraan mereka, hal ini diperkuat dengan adanya data yang dapat dilihat pada grafik sebelumnya. Pada grafik tersebut Sebagian besar responden menyatakan tidak mengalami kendala ketika melakukan kewajiban pajak mereka.

f. Kesadaran Masyarakat

Masyarakat Kota Bekasi terhadap kewajiban perpajakan terhadap kendaraan mereka tergolong cukup baik. Hal ini didukung oleh 4 grafik diatas yang masih berhubungan dengan “kesadaran” terhadap pembayaran pajak kendaraan itu

sendiri. Meski begitu penulis tetap mendapatkan beberapa responden yang memiliki kesadaran rendah terkait dengan kepatuhan pajak kendaraan mereka.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

